KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fakultas kedokteran baru, komisi IX usul perkuat kapasitas kampus lama
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Fakultas Kedokteran Baru

Komisi IX Usul Perkuat Kapasitas Kampus Lama

ANGGOTA Komisi IX DPR Ahmad Ru'yat mengingatkan pembukaan fakultas kedokteran baru harus dilakukan secara selektif. Karena, pendidikan kedokteran memiliki standar berbeda dibanding program studi lain karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan.

Dia menilai, penguatan kapasitas fakultas kedokteran yang telah memiliki rekam jejak baik lebih efektif dibanding membuka banyak fakultas baru. Soalnya, belum semua institusi memiliki infrastruktur, rumah sakit pendidikan, dan tenaga pengajar yang memadai.

Selain itu, standar pendidikan kedokteran internasional tetap diperlukan untuk menjaga mutu lulusan Indonesia. "Namun penerapannya harus memperhatikan kondisi objektif sistem pendidikan kedokteran serta layanan kesehatan nasional. Agar standar yang diterapkan berjalan secara proporsional dan efektif," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, dia menyoroti sistem uji kompetensi dokter yang juga harus dievaluasi secara menyeluruh. Mekanisme seleksi dan penilaian kompetensi, sebaiknya dilakukan bertahap selama masa pendidikan. Sehingga beban evaluasi tidak seluruhnya menumpuk pada tahap akhir kelulusan.

Dia menilai, sistem yang terlalu bertumpu pada satu ujian akhir berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi lulusan kedokteran. Kondisi itu bisa terjadi setelah mahasiswa menghabiskan waktu dan biaya besar selama bertahun-tahun, tetapi menghadapi risiko gagal pada tahap penentuan akhir.

Kata Ru'yat, reformasi pendidikan kedokteran harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah dokter dan kualitas lulusan. "Selain itu, perlindungan terhadap peserta didik selama menjalani proses pendidikan juga harus diperhatikan agar tujuan peningkatan layanan kesehatan dapat tercapai secara berkelanjutan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menambahkan, Komisi IX dan Pemerintah sepakat melakukan evaluasi komprehensif terhadap pendidikan kedokteran pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Langkah itu ditujukan untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan efektif dan akuntabel.


FOTO: TEDY RAHMAN

Ahmad Ru'yat

Yahya menjelaskan, evaluasi itu harus mencakup sinkronisasi serta validasi data nasional terkait peserta retaker dan mahasiswa yang habis masa studi. "Tingkat kelulusan uji kompetensi hingga distribusinya di setiap fakultas kedokteran juga diminta jadi bagian dari pembahasan menyeluruh," katanya.

Dia meminta Pemerintah mengevaluasi fakultas kedokteran yang secara konsisten menghasilkan retaker dalam jumlah tinggi. Berbagai opsi remediasi juga perlu dikaji tanpa menurunkan standar kompetensi dokter, sekaligus tetap menjaga keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan nasional.

Komisi IX, sambung Yahya, meminta hasil evaluasi beserta opsi penyelesaian kebijakan disampaikan pada DPR paling lambat Agustus 2026. "Kami meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menindaklanjuti secara terukur," ucapnya.

Selain pendidikan kedokteran, pihaknya turut menyoroti penyelenggaraan Program Internship Dokter Indonesia yang belakangan jadi perhatian publik. Sorotan itu muncul setelah sejumlah kasus meninggalnya peserta internship. Karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program itu di lapangan.

DPR meminta Kemenkes mengevaluasi berbagai aspek dalam program internship dokter Indonesia secara menyeluruh. "Evaluasi itu mencakup keselamatan kerja, kesehatan mental, sistem supervisi, perlindungan hukum, hingga bantuan biaya hidup bagi peserta selama menjalankan program penugasan itu," ujarnya.

Terkait fakultas kedokteran, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar kampus yang banyak meluluskan sarjana kedokteran tetapi gagal pada uji kompetensi dikenai pengurangan kuota mahasiswa baru. Pasalnya, tingginya angka retaker masih jadi persoalan, dengan 63 persen peserta mengikuti ujian kurang dari tiga kali.

Dia menilai, data kegagalan uji kompetensi seharusnya bisa ditelusuri hingga ke tingkat institusi. Dari situ, Pemerintah bisa mengambil tindakan terhadap fakultas yang bermasalah. "Temuan itu harus dijadikan umpan balik bagi pengelola program studi. Saya menyarankan kalau bisa itu dipakai sebagai feedback," ujarnya. ■ PYB